

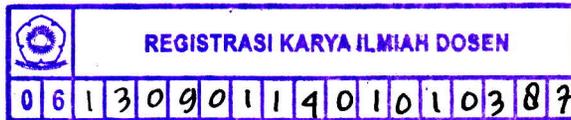
PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN 2013

*“Membangun SDM Indonesia melalui
Pendidikan yang Membebaskan”*

Palembang, 26 Januari 2013



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**



SIMETRI 2013

4/11/2014

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan 2013

*Membangun Sdm Indonesia
Melalui Pendidikan Yang Membebaskan*

Editor:

Dr. Somakim, M.Pd.

Dr. Yusuf Hartono

Hapizah, S.Pd., M.T.

Reviewer:

Prof. Dr. Julan Hernadi, M.Si. (Universitas Muhammadiyah Ponorogo)

Dr. Ketang Wiyono, M.Pd. (Universitas Sriwijaya)

Dr. Nurhayati, M.Pd. (Universitas Sriwijaya)

Dr. Risna Nosanti, M.Pd. (Universitas Muhammadiyah Bengkulu)

**Program Studi Pendidikan Matematika
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2013**

TELAAH SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DARI PERSPEKTIF PENDIDIKAN PEMBEBASAN

Azizah Husin ✓

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan; Email: azizahhusin66@yahoo.co.id

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini adalah untuk menelaah system pendidikan nasional dilihat dari prespektif pendidikan pembebasan. Potret system pendidikan Indonesia masih belum mencerminkan terlaksananya praktek pemberian hak kepada guru dan sekolah untuk berperan dalam system pendidikan yakni sebagai subjek pendidikan. Peranan guru dan sekolah hanya sebagai pelaksana kebijakan kemendikbud yakni pelaksana kurikulum nasional, sistem evaluasi nasional, dan swastanisasi pendidikan. Hal ini berdampak pada pelaksanaan proses pendidikan disekolah yakni pada pelaksanaan proses pendidikan di lapangan. Kurikulum yang overloaded menyebabkan guru kekurangan waktu untuk mengembangkan materi ajar serta menggunakan variasi metode dalam proses pembelajaran. Penggunaan LKS jadi andalan guru. Dengan LKS guru merasakan lebih ringan mengajar jika tidak sempat mengajar atau menyelesaikan materi. Ujian nasional memacu guru dan murid mengejar prestasi nasional yang bersifat kognitif. Swastanisasi pendidikan menyebabkan biaya pendidikan menjadi mahal. Pada akhirnya tujuan pendidikan untuk membentuk insan yang inovatif kreatif menjadi kurang maksimal. Hal ini berpengaruh kepada kemampuan daya saing di tingkat global

Kata Kunci : sistem pendidikan nasional, kurikulum, ujian nasional, swastanisasi pendidikan

PENDAHULUAN

Kualitas suatu bangsa sangat ditentukan oleh peranan pendidikan yang dilaksanakan dari suatu Negara. Pendidikan merupakan wadah yang memproses anak bangsa sesuai dengan tujuan pembangunan nasional dan tujuan pendidikan nasional. Tujuan keduanya adalah membentuk bangsa yang berkualitas diantaranya bangsa yang cerdas, inovatif, mandiri dan kreatif.

Potret anak bangsa yang cerdas, inovatif, mandiri dan kreatif sulit diperoleh jika kebijakan yang dibuat tidak berasal dari kondisi di riil di lapangan. Hal ini jelas ketika dalam proses pembelajaran mentalitas top down itu berbekas kepada guru sebagai pelaksana pendidikan. Praktek pendidikan yang telah berjalan ternyata mempersempit ruang untuk memproduksi anak didik kreatif dan inovatif apalagi produktif. Kebijakan dan peraturan itu tidak berpihak dan mengakar kepada kondisi dilapangan dalam hal ini melibatkan pendidik yang memang memiliki keilmuan di bidang pendidikan serta pelaksana dilapangan yakni guru dan kepala sekolah serta memperhatikan masyarakat sebagai konsumen.

Kedudukan sekolah dan guru diperlakukan sebagai objek pendidikan. Guru memiliki beban mengajar yang overloaded. Selain itu guru dan sekolah setiap menjelang ujian nasional berada dalam situasi yang tidak nyaman dalam dunia pendidikan. Sistem ujian nasional menjadi persoalan tersendiri yang selalu muncul dimana sebelumnya guru harus menyelesaikan kuriklum yang overloaded sesuai jadwal. Praktek ini memunculkan maraknya produk LKS yang jelas dinilai para guru membantu mereka dalam mengejar kualitas kognitif.

Indeks Pembangunan Pendidikan Untuk Semua atau *education for all* (EFA) di Indonesia menurun tiap tahunnya. Tahun 2011 Indonesia berada diperingkat 69 dari 127 negara dan merosot dibandingkan tahun 2010 yang berada pada posisi 65. Indeks yang dikeluarkan pada tahun 2011 oleh UNESCO ini lebih rendah dibandingkan Brunei Darussalam (34). Selain itu ditingkat persaingan global dapat dilihat dari Index Global Competitiveness (Bappenas : 2012) Indonesia yang rendah. Jika dilihat di tingkat negara-negara ASEAN menduduki peringkat ke tujuh diatas Vietnam. Faktor penyebabnya yang utama adalah birokrasi dan korupsi.

Potret lainnya adalah jual beli kualitas pendidikan. Jika ingin mendapatkan pendidikan yang berkualitas, maka masyarakat harus menyediakan uang yang cukup besar. Hal ini cukup membingungkan bagi masyarakat yang hanya mampu menyekolahkan anak tetapi tidak mampu dalam financial. Sementara ketersediaan sekolah negeri untuk tingkat lanjutan SLTP dan SLTA tidak seimbang dengan jumlah lulusan yang hanya mampu masuk di sekolah negeri. Penyediaan prasarana dan sarana pendidikan adalah tugas dari pemerintah sepenuhnya yang sudah dikemukakan dalam undang-undang. Pemerintah wajib membelajarkan masyarakat sampai pada minimal SLTP dan akan diwajibkan sampai dengan SLTA. Anggaran yang telah ditetapkan untuk pendidikan cukup besar yakni 20 %.

PEMBAHASAN

Ada beberapa potret pendidikan yang akan diulas dibawah ini. Potret itu bisa dilihat dari beberapa sisi yakni : internal dan potret eksternal. Potret internal adalah apa yang terjadi didalam lingkungan pendidikan yakni dalam proses pembelajaran. Potret internal meliputi pelaksanaan dalam proses belajar pembelajaran, waktu, dan penggunaan sumber belajar, metode, penggunaan LKS, dan penggunaan standar kompetensi ketuntasan yang ditentukan oleh sekolah. Sedangkan potret eksternal adalah potret yang didapat dari penentuan kebijakan nasional seperti kurikulum nasional dan evaluasi nasional serta swastanisasi pendidikan melalui adanya Badan Hukum Pendidikan.

Tanggung jawab pemerintah dalam pendidikan

Memaknai amanat undang-undang dasar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, maka upa itu utama dan pertama ada pada tugas pendidikan. Pendidikanlah yang menentukan kelak bagaimana suatu bangsa berkualitas tinggi. Melalui upaya pendidikan maka suatu bangsa bisa cepat mengejar kemajuan dan ketertinggalan.

Tanggungjawab pemerintah dalam pendidikan sudah jelas adalah penyedia dana melalui anggaran pendapatan dan belanja Negara. Pendidikan adalah suatu pekerjaan yang besar dan untuk menentukan kualitas bangsa, karena itu tidak bisa dengan membiarkan perjalanan pendidikan berjalan seadanya dengan menggunakan dana yang sudah ada seminimal mungkin. Sedangkan selama ini peranan masyarakat untuk mencerdaskan bangsa sudah cukup berarti seperti yang telah diberikan kontribusinya oleh pesantren-pesantren dan taman pendidikan alquran di Indonesia. Pemerintah sudah sepatutnya berterimakasih kepada lembaga yang tumbuh dari akar rumput ini, namun tidak berarti terlena dengan menswastanisasikan pendidikan.

Tugas Negara adalah menyediakan sarana dan prasarana, fasilitas, pengadaan tenaga guru yang semuanya harus mengacu kepada rasio yang imbang antara jumlah penduduk dan

kebutuhan. Selain itu juga jika bangunan sudah tidak layak lagi pemerintah dengan dana yang ada melakukan renovasi segera sebelum terjadinya kerusakan yang mengakibatkan proses belajar mengajar terganggu.

Penyediaan buku, laboratorium berikut perangkat isinya, serta fasilitas perpustakaan harusnya jadi tugas pemerintah. Keyataannya bangsa Indonesia seperti miskin, tidak punya anggaran, padahal sebenarnya karena tidak digunakan dan jika sebagian dianggarkan juga menetesnya tidak maksimal. Inilah wajah pendidikan nasional kita, birokrasi dan korupsi. (ICG, 2012)

Buramnya wajah pendidikan di Indonesia dapat disisir dari proses dan pelaksanaan pendidikan yang telah berjalan selama ini meninggalkan seperangkat permasalahan yang muncul. Permasalahan ini dibiarkan begitu saja dan tanggung jawab diberikan pada pihak swasta untuk membantu menangani masalah ini. Indonesia telah mengetahui keterpurukan dan kerugian bangsanya sendiri, namun tidak berusaha maksimal menyelesaikan masalah.

1. Kebijakan liberalisasi sector pendidikan Indonesia

Pendidikan dan outputnya tidak dapat terlepas dari tanggung jawab pemerintah. Pemerintah melalui undang-undang dasar telah menetapkan pendidikan dengan anggaran biaya sebesar 20 % dari APBN. Pendidikan memegang elemen sangat penting untuk memajukan dan mengangkat kualitas suatu bangsa. Negara-negara maju dimasa-masa awal perkembangan bangsanya memfokuskan dan memperhatikan sungguh-sungguh pendidikan rakyatnya. Sebagai hasilnya adalah perkembangan pesat dari negaranya yang disebabkan kualitas bangsanya yang tinggi. (Soerdjito :2008). Begitupun Negara-negara yang berada di lingkungan Negara ASEAN, karena pemerintahnya peduli dengan pendidikan dan benar-benar mengeluarkan biaya untuk pendidikan, maka negaranya pesat berkembang dan maju. Bila diurutkan dalam persaingan global tidak jauh berbeda rangkingnya dari Indonesia. (Kompas, Mei, 2010)

Pendidikan sekarang ini makin mahal. Jika anak mau mendapatkan pendidikan dengan kualitas tinggi, maka siap untuk bayar mahal. Praktek jual beli pendidikan adalah menjual kualitas dengan harga material yang mahal. Di sekolah yang mahal anak terjamin kualitasnya karena guru profesional mengajar, fasilitas cukup, kesempatan siswa untuk berkembang banyak. Praktek pendidikan seperti ini dapat mengkotak-kotakkan masyarakat dalam kelompok mempunyai dan tidak mempunyai. Hal ini berpengaruh kepada memproduksi masyarakat yang materialis yakni mengukur dengan materi terhadap sesuatu keberhasilan. Praktek jual jasa pendidikan melalui persekolahan ini semakin menjadi, sekarang ini mulai dari pendidikan anak usia dini hingga ke tingkat lanjutan atas.

Kewajiban memberikan pendidikan adalah tugas utama dari pemerintah. Seharusnya pendidikan itu tidak diliberalisasikan seperti barang dagangan. Kualitas pendidikan adalah tanggung jawab dari penentu kebijakan pendidikan dan pelaksana dilapangan. Jika kebijakan dan peraturannya tidak berakar dari permasalahan di tingkat bawah serta ada kepentingan tertentu, maka pada prakteknya nanti yang jadi korban adalah anak didik dan masyarakat.

Penyediaan gedung sekolah, perbaikan gedung sekolah, operasional sekolah, dan lainnya seputar pendidikan, research dan pengembangan pendidikan adalah didanai oleh pemerintah. Dana pendidikan yang sudah ditentukan dalam anggaran selama sebesar 20 %. Harusnya digunakan sejak ketentuan itu ada dengan sebaik-baiknya sehingga rakyat

Indonesia ini tidak tertinggal dari Negara Asean lainnya, karena Indonesia merdeka sudah cukup lama.

Perhatian pemerintah terhadap pendidikan memang dirasakan masih belum maksimal. Masalah-masalah pendidikan yang muncul sebagai cerminan dari keadaan ini. Masalah itu berupa kualitas pendidikan, karakter anak didik, output kurang mampu bersaing, sarana dan prasarana pendidikan, pemerataan pendidikan, keadilan, mutu guru, dan lainnya. Kesemuanya permasalahan itu akan berkurang jika sejak dulu pemerintah sungguh-sungguh mengutamakan pendidikan. Akibatnya tumbuh subur sekolah swasta yang menjual mahal kualitas pendidikan. Fenomena lain yang muncul akibat sekolah negeri yang kurang memaksimalkan pendidikannya karena berbagai alasan, adalah pusat-pusat bimbingan belajar tumbuh bagaikan jamur.

Indikator majunya suatu bangsa dilihat dari perhatian dan dana yang diberikan untuk pendidikan. Melalui pendidikanlah Negara bisa maju pesat mengikuti bangsa-bangsa lain. Apa yang terjadi di Negara kita ?. Pemanfaatan dana pendidikan tidak digunakan sebagaimana mestinya. Apa yang telah dianggarkan dalam APBN hanyalah angka saja. Menunggu Negara mengukurkan dana sebagaimana dianggarkan memerlukan perjalanan waktu yang panjang dengan proses yang rumit. Akibatnya Indonesia selalu kalah dalam urutan ranking untuk semua bidang khususnya dalam ruang lingkup pendidikan. Dampaknya sudah pasti terhadap kualitas sumberdaya manusia yang selalu berada pada ranking yang rendah. Jika dibanding dengan jumlah penduduk dan lamanya jarak waktu sejak dari Negara Indonesia merdeka sampai dengan sekarang sangat tidak sebanding pencapaian pembangunan yang seharusnya telah dicapai. Yang menyedihkan lagi adalah Negara-negara dilingkungan ASEAN yang baru tumbuh tidak jauh posisinya dengan Indonesia yang dikatakan Negara yang besar (jumlah Penduduk dan lebih dulu merdeka).

Karena pemerintah kurang mencurahkan perhatian pada dunia pendidikan, akhirnya dalam dunia pendidikan terjadi praktek jual beli. Kekurang perhatian ini didasarkan juga oleh masuknya unsur perdagangan dalam dunia pendidikan. Pada Tahun 2001 Pemerintah Indonesia telah meratifikasi kesepakatan tentang perdagangan jasa (General Adjustment On Trade and Service/GATS). Di mana dunia pendidikan dimasukkan menjadi salah satu dari 16 komoditas (barang dagangan). Dengan demikian, para investor dapat menanamkan investasinya disektor pendidikan (terutama pendidikan tinggi). (http://pp-frontmahasiswanasional.blogspot.com/2012/07/fassme-dalam-dunia-pendidikan_06.html)

Pendidikan diserahkan pada suatu system pasar, maka dampaknya adalah jika masyarakat ingin mendapatkan sekolah dengan berkualitas tinggi, carilah sekolah yang bayarannya mahal. Mentalitas seperti ini terbentuk pada masyarakat, maka perilaku produknya lulusannya materialis yakni masyarakat menilai sesuatu benda atau uang dalam hal ini dari kemampuan seseorang membayar. Dampaknya menjadikan masyarakat materialistic. Praktek pendidikan bukanlah praktek jual beli, namun adalah praktek pendidikan, pembelajaran pengetahuan, nilai-nilai, keterampilan pendidikan dan pembelajaran, dan tanggung jawab utama adalah pemerintah untuk mencerdaskan masyarakat

Kebijakan di sector pendidikan, tidak terlepas dari kepentingan Negara tertentu dalam proses liberalisasi sector pendidikan di Indonesia. Dalam kesepakatan untuk kucuran hutang (Letter of Intent/LOI) dari IMF, pada tahun 1999, terdapat kesepakatan bahwa pemerintah harus mencabut subsidi untuk sector pendidikan dan kesehatan. Melalui Bank

Dunia. Pemerintah Indonesia telah mendapatkan kucuran hutang sebesar \$ 114,54 untuk membiayai program Indonesian *Managing Higher Education for Relevance and Efficiency*. Kesepakatan ini di tanda tangani pada bulan Juni 2005. Program ini bertujuan untuk mewujudkan otonomi perguruan tinggi, efisiensi dan relevansi dengan kebutuhan pasar. World Bank menilai, bahwa pendidikan terlalu menyedot banyak anggaran, maka subsidi di sector pendidikan harus di pangkas.

Pemerintah hanya mengalokasi 2,5% anggaran untuk sector pendidikan. Bagi PTN dan PTS, alokasi anggaran tersebut meliputi pembiayaan investasi, pegawai, operasional dan pengembangan institusi (dalam Pasal 89). Faktanya, dari APBN-P 2012, anggaran pendidikan sebesar Rp.285 triliun, namun hanya dialokasikan untuk pendidikan tinggi sebesar Rp. 5 Triliun. Jika dibagikan ke seluruh perguruan tinggi yang mencapai jumlah 3.150, tentu angka Rp.5 Triliun tadi merupakan jumlah yang sangat terbatas. Selanjutnya, dalam UU tersebut juga telah diatur bahwa, setiap PTN dan PTS memiliki kewenangan untuk menetapkan jenis biaya pendidikan diluar penyelenggaraan pendidikan (SPP).

Banyak sekali dampak yang akan muncul dari kebijakan ini. Terutama adalah, semakin sempitnya akses rakyat atas pendidikan. Berdasarkan data BPS Maret 2011, Pemuda Indonesia yang berusia 19-24 tahun berjumlah 25,404 juta jiwa. Sedangkan jumlah penduduk miskin per Maret 2011 sejumlah 30,5 juta jiwa, dengan pendapatan perkapita sebesar Rp.233.740 perbulan. (http: http://pp-frontmahasiswanasional.blogspot.com/2012/07/fasisme-dalam-dunia-pendidikan_06.html#more).

2. Kurikulum yang terlalu padat tidak manusiawi baik bagi guru maupun murid

Kurikulum overloaded adalah memberikan banyak mata pelajaran kepada anak didik yang harus diselesaikannya dalam satu semester dan satu tahun. Akibat banyaknya mata pelajaran, maka siswa tidak sempat mendalami materi, hanya sebatas permukaan yang sifatnya menyebutkan dan level pengetahuannya adalah mengetahui informasi. (Anderson :2010). Level ini untuk anak usia SLTP dan SLTA, sudah tidak cocok lagi karena mereka sudah harus berpikir abstrak. (Piaget :2001) Akibat kurikulum terlalu padat, beban siswa berat, masa bermain atau masa yang seharusnya diisi untuk pengembangan unsur lain dimana dalam pendidikan sangat berperan (Santrock : 2007) tidak tersedia lagi. Pulang sekolah anak mengerjakan setumpuk pekerjaan rumah. Belum lagi anak siikutsertakan bimbingan belajar agar bisa lolos dalam ujian nasional dengan nilai baik. Sistem seperti ini membawa anak menjadi orang yang hanya pandai berteori tidak pandai bekerja dan kering dalam penghayatan, tanggung jawab dan kepekaan serta kepedulian pada masalah yang terjadi sehari-hari. Kemandirian mental anak kurang terasah. . (Meredith : 2003)

Beban belajar itu sudah terjadi sejak SD bahkan ada TK atau taman-kanak-kanak sudah diajari membaca, menulis, dan berhitung untuk mempersiapkan anak tersebut masuk SD. Jadi sekolah dasar sekarang secara tidak sadar tidak mau direpotkan lagi oleh urusan mengajari anak membaca, menulis dan berhitung. Akibatnya karena pengetahuan itu sudah diberikan sejak SD maka jika dilihat dari beban kompetensi yang harus mereka kuasai sangat berat dan jauh dari tingkat kognisi anak (Djaali :2009). Ditambah lagi metode pengajaran yang tetap saja masih konvensional. Ditambah lagi alasan tidak ada waktu untuk menerapkan metode-metode lainnya apalagi metode model pembelajaran kontekstual learning karena muatan pelajaran yang banyak. Akhirnya produk dari cara ini anak menjadi mekanis tidak

bisa mengembangkan *self actualization*. (Santrock : 2004) dan dalam dalam psikologi belajar cara ini tidak dehumanisasi. Dehumanisasi adalah praktek pendidikan yang memanusiaikan manusia. (Freire : 1998)

Jadi dari aspek metode tidak memanusiaikan anak didik, ditambah lagi anak mendapat beban pelajaran yang banyak yang didominasi oleh komponen kognitif , maka terciptalah budaya yang tidak positif terhadap system pendidikan nasional, dampaknya kepada kualitas pendidikan, dan pada akhirnya secara keseluruhan jelas berdampak pada kualitas sumberdaya manusia Indonesia.

Produk lain dari pengejaran domain kognitif adalah tersedianya LKS pada semua mata pelajaran. Hal ini tampaknya baik, namun apa gunanya buku pedoman pokok yang sudah dimiliki jika masih menggunakan LKS untuk mengerjakan soal-soal. Akibat cara ini guru hanya melepas siswa dengan LKS yang sudah dianggap mewakili guru sebab siswa telah mengerjakan dengan benar soal tersebut. Sebenarnya siswa hanya dapat sedikit dengan LKS apalagi untuk memperluas wawasan siswa yang menyangkut domain lainnya. Karena LKS dianggap sudah mewakili segala metode pembelajaran. Penggunaan LKS boleh saja digunakan, namun LKS akhirnya menjadi andalan guru. Jika guru bidang studi tidak masuk, maka LKS digunakan. Jika guru bidang studi ada urusan, maka LKS digunakan, Jika guru mau mengobrol, maka LKS digunakan. Akhirnya peranan LKS menjadi peran pengganti guru. Sementara dalam LKS adalah siswa berkutat dengan gudang soal yang didominasi oleh pengasahan unsur kognitif. Kesimpulannya LKS adalah andalan guru jika tidak melaksanakan tugas.

Masalah waktu yang tidak cukup menyebabkan guru tidak punya waktu dan kehilangan semangat untuk mengembangkan atau melahirkan ide mengembangkan materi secara lebih luas dan dalam. Selain itu juga waktu yang sempit menyebabkan guru tidak bersemangat untuk menggunakan bermacam metode yang kontekstual, ditambah lagi guru tidak banyak memahami dan tidak terbiasa menggunakan beragam metode ketika mengajar. (Arends :2007)

Sistem Kemampuan Ketuntasan Murid (angka KKM) yang tinggi.

Produk dari mengejar ketuntasan kognitif, maka KKM dibuat setinggi-tingginya. Apakah hasil 7.5 itu adalah memang menunjukkan ketuntasan murid, bukanla jaminan. Faktanya guru memaksakan nilai itu jika guru membuat nilai atau raport hasil belajar siswa, maka anak yang normal, mendapatkan ketuntasan pas-pasan atau lebih. Tetapi bagi anak yang kurang, masih saja angka ketuntasan it dipaksakan. Jadi bukan jaminan angka yang diperoleh anak didik dengan standar 7.5 adalah benar-benar hasil murni anak atau dipoles dengan unsur lain. Karena standar ketuntasan tinggi, guru kesulitan untuk memoles angka mencapai tuntas. Hal ini cukup peroblematik apalagi hampir sebagian besar murid mendapat angka dibawah KKM pada hampir seluruh mata pelajaran khususnya di daerah pedesaan.

3. Sistem ujian nasional dan dampaknya terhadap guru, murid dan budaya

Ujian nasional seharusnya tidak perlu dilakukan melihat kondisi Indonesia yang geografisnya sangat beragam, dan tersebar luas diseluruh wilayah nusantara. Kondisi soal ekonomi yang juga beragam, kemajuan daerah berbeda, sarana prasarana, fasilitas dan transportasi juga berbeda. Jadi perbedaan dan keragaman itu berkorelasi dengan

ketercukupan dan kualitas dalam pendidikan di wilayah tersebut baik pelaku pendidikan (guru) maupun sumberdaya awal (*raw input*)/ anak didik. Jika dilakukan juga ujian nasional memakan biaya besar, tidak efektif dan efisien. Malahan selalu membawa problema baru setiap menjelang ujian nasional (Kompas, Juni, 2012)

Pelaksanaan ujian nasional setiap tahun selalu membawa persoalan yang tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, karena akan mempengaruhi pendidikan secara keseluruhan, guru, kepala sekolah, anak didik, dan budaya.

a. Dampak psikologis terhadap guru dan sekolah

Dampak dari pelaksanaan ujian nasional adalah : tidak mencerminkan kemampuan siswa sesuai dengan wilayahnya/ lokalnya. Ada sekolah yang tidak banyak koneksi dengan depdiknas, maka siswanya banyak yang gagal ujian nasional, tingkat kelulusannya rendah. Ketidakpercayaan diri guru terhadap kelulusan siswanya menyebabkan banyak perilaku personal sekolah yang tidak mencerminkan perilaku dunia pendidikan seperti : kerjasama dengan siswa menunggu soal ujian nasional dari depdiknas dengan alasan sholat/ doa bersama yang dilaksanakan disekolah. Padahal saat menjelang ujian satu atau dua hari siswa harusnya diam dirumah, menenangkan diri menghadapi ujian atau menambah-nambah belajar. Guru dan Kepala sekolah mengalami kegelisahan takut jika sekolahnya mendapatkan kelulusan yang kurang, berakibat sekolah tersebut tidak mendapatkan bantuan selain itu juga ketidakpercayaan dari masyarakat. Akhirnya professional guru dan dunia pendidikan dipertanyakan. (kompassiana, 2012)

Yang dimaksud praktek pendidikan pembebasan adalah : pendidikan yang dijalankan benar memanusiaikan manusia (dehumanisasi), dimana pendidik dan peserta didik bisa berkespresi, berkreasi, mengeluarkan pendapat tanpa terbelenggu oleh kebijakan dan peraturan yang kurang atau tidak berkorelasi dengan pendidikan. Selain itu jangan sampai. Jika membuat kebijakan meskipun guru dan sekolah adalah pegawai negeri dalam jajaran birokrasi, namun pendidik adalah orang yang lakukan tugas pendidikan dan pembelajaran dalam hal ini guru adalah pihak yang lebih dekat sehari-hari dengan murid adalah pihak yang tahu langsung dengan permasalahan pendidikan.

Selain itu ada praktek – praktek dalam departemen pendidikan yang tidak benar seperti menjual soal, memungut uang kepada guru dalam berbagai urusan yang bersentuhan dengan depdiknas. Hal ini sangat membelenggu kreativitas dan kemurnian dari pendidikan itu sendiri. Dampaknya adalah wajah pendidikan menjadi suram karena perilaku warganya sendiri. (Kompassiana, mei 2012)

Sistem ujian nasional yang dibuat pemerintah adalah untuk melihat kemampuan akhir siswa setelah masa pendidikan selama SD<SLTP, dan SLTA. Evaluasi diukur berdasarkan kemampuan kognitif. Jika hasil dari perhitungan computer mendapatkan angka tertentu, maka itulah kemampuan siswa.

Sistem ini sangat merugikan anak dan guru serta sekolah. Merugikan dalam hal : setiap menghadapi ujian nasional, siswa diajak tidak jujur. Dengan berpura-pura ada acara berdoa bersama, siswa sehari atau dua hari sebelum ujian dilaksanakan, masih diharapkan datang kesekolah. Seharusnya anak sudah diberi waktu untuk tenang, menjaga kesehatan, menyiapkan segala sesuatu sehingga pada saat menjelang ujian sudah sangat siap.

Sistem ini sangat merugikan sekolah, karena jika disekolah itu yang tidak lulus berjumlah tertentu, maka nama baik sekolah menjadi turun di mata masyarakat. Sekolah

sudah tidak diakui kredibilitasnya. Selain itu konsekwensinya sekolah tidak mendapat bantuan dana dari pemerintah/ kemendikbud. Kondisi ini sangat merugikan sekolah.

Sistem ini sangat merugikan guru, karena guru dalam rangka menghadapi ujian nasional ini, seperti berpacu jantung karena khawatir jika sekolahnya tidak sukses menjalankan ujian nasional. Selain itu kekhawatiran terbesar adalah ketidaklulusan murid.

Selain itu dampaknya adalah ketidak berdayaan sekolah dan guru serta murid dalam menghadapi ujian ini dengan melakukan doa bersama. Tradisi ini tidak jelek, namun mengapa ini harus dilakukan sangat dekat dengan masa-masa ujian nasional. Disini kelihatan kegelisahan perangkat guru dan sekolah, rasa ketidak percaya diri dan lainnya. Kejadian ini berjalan pada sekolah yang berkualitas sampai kesekolah yang kurang berkualitas.

b. Dampaknya terhadap Budaya

Ujian nasional ini berjalan sudah bertahun-tahun dengan praktek yang sama. Hal ini berpengaruh pada pembiasaan suatu praktek dan nilai-nilai masyarakat. Jika suatu praktek dalam realitas kehidupan sudah berjalan lebih dari hitungan tertentu, dan masyarakat sudah menganggap itu biasa apalagi dilakukan secara nasional, maka praktek ini menjadi budaya masyarakat. Jika suatu praktek dalam kehidupan serta system nilai yang dikembangkan adalah positif, maka peradapan juga akan membuahkan masyarakat yang beradap. Namun jika suatu praktek tidak mengangkat nilai positif, maka budaya yang diciptakan adalah budaya negatif.

Budaya ini memproduk ketidak jujuran guru dan kepala sekolah, kegelisahan dan ketidak percaya diri guru+kepala sekolah terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nasib murid dan sekolah mereka ditentukan oleh computer. Selain itu kredibilitas sekolah ditentukan oleh depdikbud. Kedudukan guru dan sekolah sangat lemah. Hal ini menjadi senjata depdikbud dan perangkatnya untuk memperlemah sekolah. Padahal seharusnya sekolah-sekolah tidak demikian. Dalam pendidikan tidak boleh ada praktek superior dan inferior selagi sekolah itu melakukan hal yang baik. Jika ada sekolah yang tidak kerjasama dengan depdikbud, maka siap untuk mendapatkan angka ketidaklulusan siswa yang banyak.

c. Dampaknya pada perilaku murid

Murid akan melakukan praktek tahu-sama tahu dan praktek tidak jujur sejak disekolah. Nilai-nilai ketidak jujuran dihapus oleh sekolah. Kelak jika mereka sudah terjun di masyarakat budaya ini akan dibawa kemasyarakat tanpa disadari. Seharusnya melalui sekolah murid diajar hal yang baik, bukan nilai yang buruk. Depdikbud tidak menyadari hal besar ini.

Dampak lain dalam kurikulum, domain afektif dan psikomotor tidak tercover dengan baik. Siswa akhirnya mengejar sesuatu hanya didasarkan pada angka dan hasil. Pola fikir tidak banyak memperhatikan proses. Sekolah seperti mesin kering dari unsur afeksi.

Guru dan sekolah sebagai objek dari pendidikan

Permasalahan system pendidikan Indonesia tidak memberi banyak kebebasan kepada perangkat guru dan kepala sekolah dalam hak bersuara dan berpendapat. Suara guru tidak begitu didengar. Yang ada pada system pendidikan nasional sekarang ini sudah sekian lama sitem pendidikan berlangsung, sekolah tidak berfungsi maksimal untuk memberikan hak suara itu. Guru tidak dihargai potensinya, guru hanya dituntut patuh dengan segala peraturan atau hal baru yang diterapkan.

Guru dan sekolah sebagai objek pendidikan dikatakan demikian karena : guru dan kepala sekolah hanya berperan menurut apapun yang telah diputuskan atau digodok oleh kemendikbud. Guru dan sekolah berada pada posisi birokrasi pendidikan yang tidak berfungsi banyak hak suaranya. Terbukti dari keberadaan PGRI. Posisi guru dalam birokrasi pendidikan berarti jajaran guru dan kepala sekolah adalah dipayungi oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan. Sistem pendidikan nasional yang berhak mengatur, memanejemen, mengevaluasi, memonitoring, dan mengawasi adalah satu payung pusat yakni kementerian pendidikan dan kebudayaan. Disini status guru adalah pegawai negeri dalam naungan kemendikbud sebagai atasan. Jadi kepala sekolah dan guru harus tunduk kepada keputusan kementerian.

Hal ini kontradiksi dengan kenyataan bahwa guru adalah pelaku pendidikan, bertanggung jawab dan berhadapan langsung dengan anak didik yang menghadapi proses pembelajaran setiap harinya. Sebagai pelaksana pendidikan gurulah yang tahu semua persoalan yang menyangkut raw input sampai kepada proses dan hasil serta permasalahan pendidikan. Sebenarnya guru dan kepala sekolah adalah penentu produk pendidikan. Organisasi guru dalam hal ini kurang mendapatkan perhatian yang berarti dalam pembuatan keputusan.

Guru selain sebagai pengajar, guru juga sebagai pendidik. Sebagai pendidik, guru bertanggung jawab dan bertugas mendidik anak sehingga menjadi insan yang berperilaku positif terhadap pribadi, masyarakat dan Negara dengan menerapkan nilai-nilai pendidikan yang diterima darimana saja khususnya sekolah. Selain membentuk manusia cerdas juga kreatif, inovatif, mandiri dan produktif.

Pendidikan bukan brokrasi

Pendidikan bukanlah berada atau dibawah birokrasi dan jauh dari kepentingan. Pendidikan berkecimpung didalam bidang kegiatan pendidikan, pembelajaran, pengetahuan, keilmuan, pelatihan, keterampilan. Birokrasi berkaitan dengan perjenjangan dalam karir/jabatan dan ada atasan serta bawahan. Dalam dunia pendidikan kebenaranlah dan hal-hal yang baik yang jadi pedoman/ pegangan. Dengan demikian pendidikan tidak boleh dicampuri oleh kepentingan politik, golongan, dan kelompok serta individu. Wilayahnya berbeda.

pendidikan itu adalah murni bertujuan untuk menjadikan anak didik berkualitas. Diharapkan anak didik kelak menjadi anak yang dapat mengisi kehidupannya dengan berpikir, mengembangkan nilai-nilai dan berbuat hal-hal yang baik secara maksimal sesuai dengan potensi dan keunikan anak didik tersebut. Namun apa yang terjadi dalam dunia pendidikan kita adalah turut campurnya birokrasi sampai pada ranah penentuan kebijakan.

Jika ranah pendidikan sudah tidak murni penuh dengan kepentingan-kepentingan yang berselimut pendidikan, maka pada akhirnya pendidikan Indonesia sudah tidak dapat menjadi andalan masyarakat untuk dipercayai. Apalagi dengan adanya undang-undang yang mengatur pendidikan tidak berorientasi kepada masyarakat sebagai konsumen. Tugas pemerintah adalah mensejahterakan masyarakat dan memberikan pendidikan semaksimal mungkin untuk memajukan masyarakatnya karena menyangkut pembangunan kualitas bangsa.

Dunia pendidikan harus bersih dari masuknya unsur-unsur ketidak bebasan, ketakutan menyatakan pendapat atau juga ketidak mampuan mengungkapkan pemikiran untuk pembuatan kebijakan, maka kurikulum dan sistim pendidikan nasional selalu mempunyai masalah yang sama seperti yang terjadi berulang-ulang keadaan sekarang ini. Jika pendidikan dimasuki oleh kepentingan yang berbagai ragam apalagi dimasuki oleh politik, maka selanjutnya pendidikan akan selau mempunyai wajah yang suram.

Sudah saatnya Indonesia tidak mencampur adukkan birokrasi dengan pendidikan agar posisi guru sebagai pelaksana pendidikan benar-benar terangkat. Jika guru berperanan maka peraktek pendidikan yang menciptakan anak yang kreatif dan inovatif akan terwujud. Pengaruhnya kelak akan mengangkat kualitas produk pendidikan dengan kualitas daya saing yang tinggi didunia global.

PENUTUP

Pendidikan di Indonesia belum mencerminkan usaha pemerintah yang sungguh-sungguh untuk mengisi tujuan pembangunan dan pendidikan nasional. Pemerintah banyak melemparkan tanggung jawab dunia pendidikan kepada swasta. Akibatnya biaya pendidikan makin tinggi. Selain itu pemerintah juga mengambil peranan penting dalam penetapan kebijakan pendidikan. Dampaknya ada pada rendahnya kualitas bangsa Indonesia secara keseluruhan. Pendidikan di Indonesia belum sampai pada taraf memberikan hak kepada pelaksana pendidikan yakni guru dan sekolah untuk berperan serta dalam memecahkan masalah pendidikan. Guru sebagai komponen inti dalam melaksanakan tugas pendidikan dan langsung berhubungan dengan peserta didik dipandang sebagai objek pendidikan bukan sebagai subjek. Hak itu dalam hal menentukan evaluasi pendidikan, dalam dalam menentukan kebijakan pendidikan termasuk kurikulum. Dampaknya berpengaruh pada proses dan output pendidikan yang tidak mampu bersaing dengan bangsa lain. System pendidikan nasional belum membudayakan masyarakat ilmiah yang bebas berpendapat dan berkreasi. Secara tidak disadari kondisi ini mempengaruhi proses pelaksanaan pembelajaran guru terhadap tugas dalam memberikan tiga ranah kognitif, afektif dan psikomotor semakin kecil. Yang diandalkan adalah mengejar prestasi siswa dan sekolah melalui segala jalan agar sekolah menghasilkan 100 % kelulusan. Orientasi guru dalam pendidikan akhirnya tidak maksimal menjadikan anak didik sukses secara total. Kemudian system penentuan kompetensi ketuntasan siswa dengan menetapkan kenaikan kelas adalah suatu yang dipaksakan, karena kriteria itu adalah harapan guru bukan realita yang menunjukkan kualitas sekolah. Padahal berapa persen murid naik kelas dengan pencapaian tersebut. Selain itu berapa persen sekolah yang dapat menerapkan standar ketuntasan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fandi, Haryanto. 2011. *Desain Pembelajaran yang Demokratis & Humanis*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Arends, Richard I. (2007) *Learning to Teach*. Edisi Ketujuh. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Djaali (2008). *Psikologi Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara

- Front Mahasiswa Nasional tanggal 06 juli 2012, (http://pp-frontmahasiswanasional.blogspot.com/2012/07/fasisme-dalam-dunia-pendidikan_06.html#more) diunduh 12 januari 2012.
- Hardiman, F. Budi. 2007. *Filsafat Modern dari Machiacelli sampai Nietzsche*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Harjatanaya, TY. (2012). *Potret Pendidikan di Indonesia*.
- Hidayanto, Muhammad, (2013) Masalah Pendidikan Di Indonesia Dan Solusinya. <http://edukasi.kompasiana.com/2012/05/07/fenomena-un-dan-potret-kegagalan-dunia-pendidikan-455714.html>, Diunduh 12 Januari 2013
- John W. Santrock. 2004. *Educational Psychology*. New York : Mc Graw Hill Company
- Lorin W Anderson dan David R . Krathwohl, (2010), *Kerangka Landasan untuk Pembelajaran, Pengajaran, dan Asesmen*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Makmun, AS. (2007) *Psikologi Kependidikan. Perangkat Sistem Pengajaran Modul*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Mas'ud, Abdurrahman. 2004. *Menggagas Format Pendidikan Nondikotomik, Humanisme Religius sebagai Paradigma Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Gema Media.
- Mulyaningsih, WS, SNMPTN 2013: Potret Pendidikan di Indonesia. UNJ. <http://kampus.okezone.com/read/2012/12/26/367/737201/snmptn-2013-potret-pendidikan-di-indonesia>, Diunduh 11 Januari 2013
- Nasution, (2006). *Kurikulum dan Pengajaran*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Piaget, Jean (2001), *Psychology of Intelligence*. London and New York : Roudledge
- Santrock, JW (2007) *Perkembangan Anak*. Edisi kesebelas. Jakarta : Erlangga
- Soedijarto, (2008). *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*. Jakarta : Kompas.
- Suharman (2005). *Psikologi Kognitif*. Surabaya : Srikandi
- The Global Competitiveness Report 2011-2012. Bappenas.
- UNDP (2011) *Human Development Index*.
- Wina Sanjaya, (2009). *Kurikulum dan Pembelajaran, Teori dan Praktik Pengembangan KTSP*. Jakarta : Kencana.
- <http://nasional.kompas.com/read/2012/05/02/13011096/Pendidikan.Indonesia.Sebuah.Evaluasi>
Diunduh Januari 2013